

ANALISIS DAYA SAING EKONOMI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA

Ricky Jaya Dinata
Paidi Hidayat, S.E., M.Si.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the factors that affect and be decisive economic competitiveness Simalungun in 2015 by using the method of Analytical Hierarchy Process (AHP). By using purposive sampling method, this study uses primary data with questionnaires and interviews with 30 respondents consisting of students, teachers, civils, bureaucracy, banking, non-banking, and entrepreneurs.

Results from this research that the infrastructure factor becomes the most important factor in improving economic competitiveness Simalungun regency with a weight of 0,392, followed by the regional economy factors (0,221), then a factor of labor and productivity (0,199), socio political factor (0,098), and the final is institutional factors (0,090).

Keywords: Economic Competitiveness, Analytical Hierarchy Process (AHP)

PENDAHULUAN

Sejalan dengan proses pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kewenangan yang sangat besar telah diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah kabupaten maupun kota mempunyai andil besar dalam mengatur perekonomian daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang itu telah membuka banyak kesempatan emas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi daerah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten otonom yang ada di Provinsi Sumatera Utara, luas kabupaten ini adalah 4.386,60 km² atau 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 2012 sebanyak 830.986 jiwa dengan kepadatan 189,44 jiwa/km². Daerah ini terbagi menjadi 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 345 desa/nagori. Suku batak simalungun merupakan penduduk asli dari Kabupaten Simalungun. Sejak tahun 2008, ibukota Kabupaten Simalungun yang sebelumnya berada di Pematang Siantar berpindah ke Kecamatan Raya.

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun sebagian besar teletak pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Potensi sektor pertanian Kabupaten Simalungun yang memberikan kontribusi adalah tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan sektor perkebunan yang memberikan kontribusi adalah, karet, kelapa sawit, kopi, tembakau dan teh. Di Kabupaten Simalungun terdapat beberapa perkebunan milik pemerintah seperti PTPN 3, PTPN 4 dan perkebunan milik swasta seperti PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate dan PT. Toba Pulp Lestari. Sektor pariwisata, Kabupaten Simalungun memiliki beberapa titik lokasi tujuan wisata. Salah satu tujuan wisata yang terkenal di Simalungun adalah kota Parapat di pinggir Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia. Namun potensi pariwisata tersebut masih belum dioptimalkan, salah satu penghambatnya adalah fasilitas dan infrastruktur fisik yang masih belum memadai.

Berdasarkan hasil dari penelitian PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD (2008) dalam neraca daya saing daerah, Kabupaten Simalungun berada di peringkat 214 secara keseluruhan

dalam daya saing daerah dari 434 neraca daya saing daerah. Peringkat ini masih jauh di bawah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara seperti Kabupaten Asahan yang berada di peringkat 73, Kabupaten Deli Serdang di peringkat 95, Kota Medan di peringkat 23, dan kota yang letaknya berada disebelah kabupaten Simalungun yaitu Kota Pematangsiantar di peringkat 117. Berdasarkan input perekonomian daerah, Kabupaten Simalungun berada di peringkat 252. Berdasarkan infrastruktur, SDA dan lingkungan, Kabupaten Simalungun berada di peringkat 202. Dan berdasarkan output tingkat kesempatan kerja Kabupaten Simalungun berada di peringkat 150. Ini mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Simalungun dan infrastruktur yang masih belum memadai.

BPS Kabupaten Simalungun menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun pada tahun 2012 sebesar 6,06 persen. PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2012 atas dasar harga berlaku sebesar 13055,30 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 6251,83 triliun rupiah. Jika dilihat menurut lapangan usahanya maka sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu 7060,74 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 5,55 persen dibanding tahun 2011. Sementara lapangan usaha yang kontribusinya terkecil adalah pertambangan dan penggalian yaitu 57,42 miliar rupiah.

Persaingan antar daerah yang semakin ketat, membuat pemerintah daerah tak terkecuali Kabupaten Simalungun dituntut untuk lebih menyiapkan daerahnya sebaik mungkin agar dapat menarik investasi ke Kabupaten Simalungun. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah. Serta kesiapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, membuat kebijakan pemerintah daerah yang lebih strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) , reformasi birokrasi, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Michael Porter (1990, dalam PPSK-BI dan LP3E FE UNPAD 2008) menyatakan bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional adalah “*produktivitas*” yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank dunia menyatakan hal yang relatif sama di mana “*daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah perunit input yang dicapai oleh perusahaan*”. Akan tetapi, baik Bank Dunia, Porter, serta literatur-literatur lain mengenai daya saing nasional memandang bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berkecukupan hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek diluar perusahaan seperti iklim berusaha yang jelas diluar kendali perusahaan. (Abdullah dkk, 2002 : 11). Secara lebih rinci, Porter mendefinisikan daya saing nasional sebagai: “*luaran dari kemampuan suatu negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor-sektor kuncinya*”

Menurut Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI & *Regional Competitiveness Indicators & Centre for Urban and Regional Studies, 1998*) mendefinisikan “*daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional*”. Sementara itu, *Centre For Urban and Regional Studies (CURDS)* mendefinisikan “*daya saing daerah sebagai*

kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.”

Franches (2011 : 62) merumuskan definisi daya saing dalam perspektif ekonomi internal daerah dan dimensi persaingan global dan mengartikan daya saing daerah sebagai kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Selanjutnya Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI (PPSK BI) menggunakan definisi “daya saing daerah dalam penelitiannya sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”.

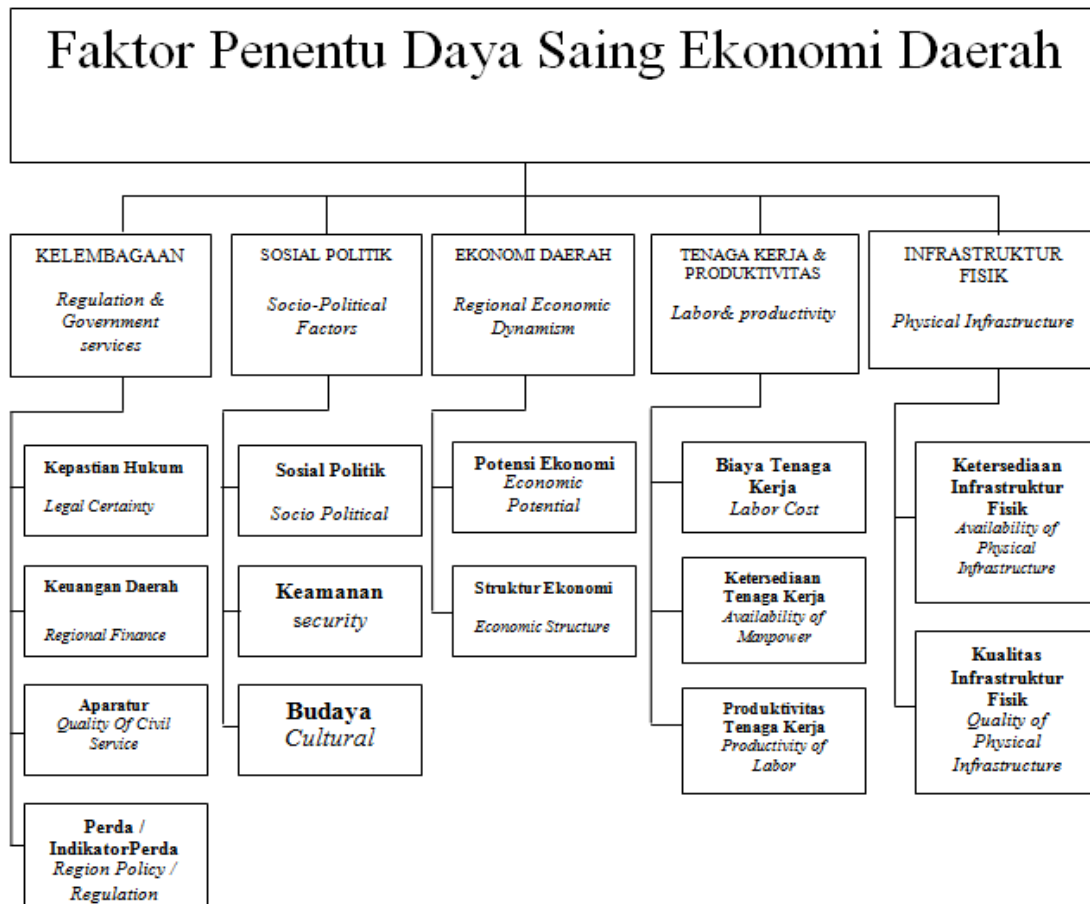
Indikator Utama Daya Saing Daerah

Menurut Hidayat (2012) penentuan indikator utama daya saing daerah merupakan bagian yang penting dalam analisis daya saing ekonomi daerah. Pemahaman indikator utama daya saing ekonomi daerah yang terbatas dan tidak secara komprehensif menjadikan tidak adanya keseragaman pemahaman yang benar oleh *stakeholders* ditingkat pemerintah daerah dan pada gilirannya akan dapat menyebabkan adanya perbedaan analisis dan kesimpulan terhadap tingkat daya saing yang dimiliki oleh suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan Abdullah, dkk (2002 : 15) menyebutkan indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (1) Perekonomian daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem Keuangan, (4) Infrastruktur dan sumber daya alam, (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber daya manusia, (7) Kelembagaan, (8) Governance dan Kebijakan pemerintah, dan (9) Manajemen dan ekonomi mikro.

Kerangka Konseptual

Penentuan variabel daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian ini. Variabel-variabel yang menjadi indikator utama dalam penelitian ini merupakan perbandingan dari beberapa hasil penelitian, seperti Abdullah dkk (2002), Santoso (2009), Irawati dkk (2008), Hidayat (2012), Millah (2013), dan KPPOD (2005). Berikut ini indikator utama penentu daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun seperti yang ditunjukkan pada kerangka berpikir dibawah ini (Gambar 1)



Gambar 1
Kerangka Konseptual analisis daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun

METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan Sampel

Prosedur pengambilan sampel atau responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan menentukan sampel atau responden yang dianggap dapat mewakili segmen kelompok masyarakat yang dinilai mempunyai pengaruh atau merasakan dampak besar terkait daya saing ekonomi daerah.

Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis daya saing ekonomi kabupaten Simalungun pada tahun 2015 meliputi analisis deskriptif dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Analisis Deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran tentang karakteristik tertentu dari data yang telah dikumpulkan. Analisis data disajikan dalam bentuk tabulasi gambar (chart) dan

diagram. Kemudian, *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yakni analisis yang digunakan untuk memberikan nilai bobot setiap faktor dan variabel dalam menghitung faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun pada tahun 2015.

Analytical Hierarchy Process (AHP) memiliki empat landasan aksiomatik/Asumsi dasar yang terdiri dari:

1. *Reciprocal Comparison*, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah K kali lebih penting daripada B maka B adalah $1/k$ kali lebih penting dari A.
2. *Homogeneity*, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.
3. *Dependence*, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (*complete hierarchy*) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (*incomplete hierarchy*).
4. *Expectation*, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan, penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Prinsip dasar metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Antara lain:

- a. *Decomposition* adalah Proses penguraian permasalahan faktor dan variabel sehingga diperoleh suatu hierarki.
- b. *Comparative judgement* adalah Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan kriteria di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh dalam menentukan prioritas dari elemen-elemen yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan.
- c. *Synthesis of Priority* adalah Setelah diperoleh perbandingan berpasangan, kemudian dicari eigen vector dari setiap matriks Pairwise Comparison untuk mendapatkan local priority.
- d. *Logical Consistency* adalah AHP mentoleransi tingkat inkonsistensi sebesar kurang dari 10%. Apabila lebih dari 10%, responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Maka, diperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan.

Berikut ini arti dari nilai 1-9 pada skala penilaian perbandingan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel 1
Skala Penilaian Perbandingan

Skala Tingkat Kepentingan	Defenisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
7	Sangat penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan elemen pasangannya
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan yang tertinggi
2,4,6,8	Nilai tengah	Diberikan bila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan
Kebalikan	$A_{ij} = 1/A_{ji}$	Bila aktivitas i memperoleh suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan i

Sumber: Thomas L. Saaty (1991)

HASIL dan PEMBAHASAN

Profil Responden

Berdasarkan hasil tabulasi dari jumlah 30 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini didapat beberapa informasi bahwa berdasarkan jenis kelamin sebagai perwakilan sampel dalam penelitian ini yakni sebesar 60% untuk pria dan 40% untuk wanita. Sedangkan untuk presentase tingkat pendidikan yang terbanyak itu adalah responden dengan pendidikan terakhir merupakan Strata 1 (S-1) sebesar 54% lalu diikuti responden dengan pendidikan terakhir merupakan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebesar 46% sedangkan presentase untuk responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak ada sama sekali atau sebesar 0%. Sedangkan, responden yang paling banyak diwawancarai yaitu responden yang berumur berkisar 20 – 30 tahun dengan presentase sebesar 40%, diikuti dengan responden dengan umur berkisar 31-40 sebesar 17%, kemudian responden dengan umur berkisar 41 – 50 berada di urutan ketiga dengan presentase sebesar 37%. Dan responden berusia >50 adalah sebesar 6%.

Tabel 2
Karakteristik Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	18	60%
2	Wanita	12	40%
	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tamatan SMP/ sederajat	0	0 %
2	Tamatan SMU/ sederajat	14	46 %
3	Sarjana Muda/D3 atau lebih tinggi	16	54 %
	Usia	Jumlah	Presentase
1	20 – 30 tahun	12	40 %
2	31 – 40 tahun	5	17 %
3	41 – 50 tahun	11	37 %
4	>51 tahun	2	6%

Sumber : Data Diolah

Pembobotan dan Pemingkatan Daya Saing Ekonomi

Deskripsi daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuknya. Semakin baik kinerja indikator – indikator tersebut, maka semakin baik pula tingkat daya saing ekonomi suatu daerah. Begitu pun sebaliknya, semakin buruk kinerja indikator-indikator tersebut maka semakin buruk pula tingkat daya saing ekonomi suatu daerah. Untuk mengetahui daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun, maka terlebih dahulu ditentukan faktor faktor penentu daya saing ekonomi dengan menentukan masing masing bobot dari faktor faktor tersebut. Pembobotan ini diperoleh dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan menggunakan bantuan software *Expert Choice*.

Pembobotan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan faktor faktor yang menentukan daya saing Ekonomi Kabupaten Simalungun tahun 2015. Bobot yang lebih besar dari suatu faktor menunjukkan tingkat faktor yang lebih penting untuk prioritas peningkatan dibandingkan dengan faktor faktor lainnya dalam menentukan tingkat daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun 2015. Berikut ini hasil pembobotan dari faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber :Data diolah

Gambar 2
Nilai Bobot dari Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Kabupaten Simalungun Tahun 2015.

Berdasarkan hasil nilai bobot dari beberapa faktor-faktor penentu daya saing Kabupaten Simalungun 2015, diketahui bahwa bobot tertinggi yakni ada pada faktor infrastruktur fisik sebesar 0,392 kemudian diikuti dengan faktor perekonomian daerah sebesar 0,221. Lalu, menyusul faktor tenaga kerja dan produktivitas sebesar 0,199. Sementara, faktor sosial politik dan kelembagaan berada di urutan keempat dan kelima dalam faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun dengan nilai masing masing pembobotan sebesar 0,098 dan 0,090.

Hasil pembobotan tersebut menunjukkan bahwa faktor faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun 2015 dipengaruhi oleh faktor infrastruktur fisik, faktor perekonomian daerah, dan faktor tenaga kerja dan produktivitas yang mana ketiga variable ini memiliki bobot lebih besar dibanding dua variable lainnya yakni sosial politik dan kelembagaan. Faktor infrastruktur fisik yang menjadi lebih penting menurut responden dalam penelitian ini, disebabkan infrastruktur sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah sehingga dapat dipastikan apabila suatu kota memiliki infrastruktur yang baik maka kota tersebut pastilah memiliki moda perekonomian yang lebih baik. Sehingga, dalam penelitian ini faktor non ekonomi yakni infrastruktur fisik merupakan variable yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan daya saing ekonomi di Kabupaten Simalungun dibandingkan dua faktor ekonominya yakni perekonomian daerah dan faktor tenaga kerja dan produktivitas. Berikut penulis akan menjelaskan masing masing faktor yang menjadi variable yang berpengaruh terhadap daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun 2015.

Faktor Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik sebagai pendukung utama dalam menggerakkan perekonomian baik secara regional maupun nasional dalam pembobotan ini merupakan prioritas yang paling utama dalam

meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun dengan pembobotan sebesar 0,392. Indikasi ini, sekaligus menguatkan sentralnya peran infrastruktur dalam kegiatan perekonomian. Dimana untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan stabil tentu harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien.

Hasil pembobotan terhadap dua variabel indikator infrastruktur fisik yakni ketersediaan infrastruktur dan kualitas infrastruktur. Sebagian besar responden lebih memprioritaskan kualitas infrastruktur fisik dengan bobot nilai 0,554 atau sebesar 55% lalu diikuti dengan ketersediaan infrastruktur dengan nilai bobot 0,446 atau sebesar 45%.

Dalam variabel kualitas infrastruktur fisik, 20% responden menyatakan sangat tidak setuju terhadap kualitas jalan sudah yang baik. 27% responden menyatakan tidak setuju, lalu 33% menyatakan kurang setuju. Hanya 20% responden yang menyatakan setuju kalau kualitas jalan di Kabupaten Simalungun sudah baik. Kemudian, untuk akses dan kualitas pelabuhan laut sebanyak 27% menyatakan sangat tidak setuju jika akses dan kualitas pelabuhan laut sudah memadai, 33% menyatakan tidak setuju, lalu 30% menyatakan kurang setuju. Hanya 10% yang menyatakan setuju dengan hal ini. Sebagian besar responden juga tidak setuju dengan akses dan kualitas pelabuhan udara sudah baik dengan presentase sebesar (83%), kemudian hanya sekitar 17% yang menyatakan setuju. Dengan kondisi demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar infrastruktur di Kabupaten Simalungun kondisinya masih belum cukup baik, perlu peningkatan kualitas jalan raya. Sebaiknya yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Simalungun adalah pembangunan jalan secara merata di seluruh kecamatan yang ada, dengan begitu akses jalan yang menghubungkan antar nagori atau kelurahan di Kabupaten Simalungun dapat berjalan dengan baik. Selain itu, terselesaikannya proyek nasional pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara dan beroperasinya Bandara Tuan Rondahaim di Kecamatan Raya diharapkan juga akan meningkatkan kinerja dan kondisi perekonomian Kabupaten Simalungun dalam bidang ekspor-impor, transportasi dan perdagangan.

Faktor Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah sebagai faktor ekonomi yang utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun. Meskipun dalam pembobotan ini merupakan prioritas kedua setelah infrastruktur fisik dengan nilai bobot sebesar 0,221. Hal ini memang tidak terlepas dari peran perekonomian daerah yang mutlak harus didukung adanya infrastruktur yang memadai. Namun demikian, kondisi perekonomian daerah berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Responden sebagian besar setuju untuk lebih memprioritaskan peningkatan pengolahan potensi ekonomi Kabupaten Simalungun dengan nilai bobot 0,593 atau sebesar 59%. Lalu responden memilih struktur ekonomi dengan nilai bobot 0,407 atau sebesar 41%.

Berdasarkan persepsi masyarakat Kabupaten Simalungun, bahwa sebanyak 67% responden menyatakan setuju terhadap peningkatan daya beli masyarakat yang cenderung semakin meningkat. Bahkan 3% menyatakan sangat setuju dan hanya sekitar 30% masyarakat menyatakan kurang setuju. Indikasi ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Simalungun semakin tinggi, maka kinerja perekonomian daerah di Kabupaten Simalungun semakin baik. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun setiap tahunnya yakni sebesar 6,06% pada tahun 2012, angka ini cenderung meningkat dari tahun 2011 yang berkisar 5,81% dan 5,12% pada tahun 2010. Sebanyak 66% responden juga setuju dengan perkembangan kondisi ekonomi yang semakin baik. Bahkan, 7% diantaranya menjawab sangat setuju. Kemudian, sebagian besar masyarakat juga setuju bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat

semakin membaik dengan presentase 56% dan hanya sekitar 44% yang menjawab kurang setuju. Hal ini seakan menjawab pernyataan responden yang setuju terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Simalungun yang cenderung meningkat yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap perkembangan kondisi perekonomian yang semakin baik. Membaiknya perekonomian daerah ini pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun kondisi perekonomian semakin membaik, tetapi sebesar 47% responden menyatakan tidak setuju bahwa kondisi harga-harga barang dan jasa relatif stabil dan terjangkau di Kabupaten Simalungun. Mengingat sebagian besar harga komoditi di Indonesia sangat bergantung terhadap harga bahan bakar minyak (BBM). Dan hingga saat ini, harga minyak yang masih naik turun menjadi masalah utama harga barang dan jasa tidak pernah cenderung stabil.

Dari perkembangan diatas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Simalungun sebenarnya sangat mampu untuk meningkatkan daya saing ekonominya jika potensi-potensi ekonomi tersebut dikelola dengan sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh elemen masyarakat. Dengan pengelolaan yang optimal dan konsisten serta berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat diharapkan akan tercipta Kabupaten Simalungun yang berdaya saing tinggi.

Faktor Tenaga Kerja dan Produktifitas

Tenaga kerja dan produktifitas Kabupaten Simalungun merupakan salah satu faktor ekonomi yang juga sangat berpengaruh terhadap daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun tahun 2015. Meskipun merupakan prioritas ketiga setelah infrastruktur fisik dan perekonomian daerah dengan memiliki bobot penilaian sebesar 0,199. Namun, dapat dipastikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Simalungun tak akan bisa berjalan tanpa adanya tenaga kerja yang produktif untuk menghasilkan barang-barang produksi di Kabupaten Simalungun. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan ikut terhambat jika tenaga kerja tidak memadai dan kurang produktif.

Pada faktor tenaga kerja dan produktifitas seperti halnya responden sangat setuju bila produktifitas tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat dengan bobot nilai produktifitas tenaga kerja sekitar 52% atau sebesar 0,517. Kemudian, ketersediaan tenaga kerja dengan bobot nilai 0,256 atau sebesar 25% dan biaya tenaga kerja dengan bobot nilai 0,227 atau sebesar 23%.

Berdasarkan persepsi masyarakat dengan wawancara responden yakni sebanyak 50% responden menyatakan kurang setuju dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang ada relatif tinggi, lalu 6% menyatakan tidak setuju. Dan hanya sekitar 44% responden menyatakan setuju akan hal tersebut. Indikasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Simalungun masih belum memuaskan. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Simalungun yakni pada tahun 2011 sebesar 4,62% kemudian meningkat sebesar 0,79% menjadi 5,41% pada tahun 2012. Dimana kemungkinan besar hal ini disebabkan sebagian pengusaha merekrut tenaga kerja dari luar Kabupaten Simalungun yang dianggap lebih baik produktifitasnya dalam membantu perusahaan melakukan proses produksi dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sebanyak 46% responden juga kurang setuju terhadap tingkat produktifitas tenaga kerja sesuai dengan besarnya upah yang ada, 6% menyatakan tidak setuju dan hanya 46% yang menyatakan setuju akan hal tersebut. Indikasi ini juga semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa tenaga kerja di Kabupaten Simalungun cenderung kurang produktif, sehingga sebagian besar perusahaan memberikan tingkat upah yang relatif lebih rendah.

Dari kondisi diatas, dapat dikatakan bahwa produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Simalungun masih jauh dikatakan layak. Hal ini juga didukung dengan jumlah pengangguran terbuka yang meningkat ditahun 2012. Ini merupakan masalah yang serius, disebabkan untuk menciptakan daya saing ekonomi yang tinggi, tentu Kabupaten Simalungun harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.

Faktor Sosial Politik

Faktor sosial politik penting dalam menentukan daya saing ekonomi suatu daerah. Suatu kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan lancar tanpa di dukung oleh keamanan dalam menjalankan dunia usaha, kondisi politik yang stabil, partisipasi, keterbukaan, serta perilaku masyarakat yang mendukung kegiatan usaha. Faktor sosial politik terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel stabilitas politik, variabel keamanan, dan variabel budaya masyarakat.

Pada kondisi saat ini, sebagian besar responden setuju bahwa keamanan merupakan prioritas yang lebih diutamakan dengan bobot nilai 0,535 atau sebesar 53% lalu keamanan dengan bobot nilai 0,338 atau sebesar 34%. Sementara, variabel budaya dengan bobot nilai 0,238 atau sebesar 24%. Variabel stabilitas politik memiliki bobot sebesar 0,228 atau 23% dari keseluruhan bobot faktor sosial politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, bahwa sebesar 66% responden setuju potensi konflik di Kabupaten Simalungun semakin menurun dan dapat dideteksi, bahkan 20% sangat setuju, hanya 145 yang menyatakan kurang setuju. Begitupun dengan semakin berkurangnya intensitas unjuk rasa yang ada di Kabupaten Simalungun, hal ini didukung dengan sebanyak 43% responden setuju bahkan sebanyak 33% responden sangat setuju dengan kondisi ini, sementara yang kurang setuju hanya 14% dan tidak setuju 10%.

Selain itu, stabilitas politik di Kabupaten Simalungun juga didukung dengan harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif dengan sebanyak 70% responden menyatakan setuju, bahkan 10% diantaranya menyatakan sangat setuju. Hal ini sesuai dengan realita sekarang, dimana sangat jarang sekali terdengar berita tentang konflik antara Bupati Simalungun dengan DPRD Simalungun. Harmonisasi yang baik antara legislatif yaitu DPRD Simalungun dengan eksekutif yakni Bupati Simalungun beserta SKPD dibawah naungannya akan menciptakan stabilitas politik di Kabupaten Simalungun dan berdampak sangat baik untuk kegiatan perekonomian dan iklim investasi

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa iklim sosial politik di Kabupaten Simalungun sudah sangat baik dan mendukung untuk iklim usaha dan kelancaran kegiatan perekonomian. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan perekonomian daerahnya dan juga investasi. Sehingga, diharapkan kedepannya pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mempertahankan kondisi sosial politik yang seperti sekarang ini untuk menciptakan Kabupaten Simalungun yang berdaya saing tinggi.

Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan merupakan satu satunya faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun yang berada dibawah kendali pemerintah kabupaten atau disebut dengan *policy variable*. Faktor kelembagaan terdiri dari empat variabel, yaitu variabel kepastian hukum, variabel pembiayaan pembangunan (keuangan daerah), variabel aparatur, dan variabel peraturan daerah.

Variabel yang terdapat dalam faktor ini setelah dilakukan pembobotan dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju untuk lebih memprioritaskan kepastian hukum dan juga pembiayaan pembangunan dalam hal ini peningkatan

porsi belanja modal dan barang dalam APBD untuk menunjang pembangunan. Variabel kepastian hukum dengan nilai bobot 0,311 atau sebesar 31% dan pembiayaan pembangunan dengan bobot 0,273 atau sebesar 27%. Selanjutnya, responden memilih aparatur dengan nilai bobot 0,210 atau sebesar 21% dan peraturan daerah dengan nilai bobot 0,207 atau sebesar 21%. Dibawah ini penulis lampirkan diagram presentasi variabel variabel faktor kelembagaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebanyak 50% responden setuju dengan konsistensi peraturan yang mengatur kegiatan usaha sudah berjalan baik, 3% menyatakan sangat setuju, namun sebanyak 47% responden menyatakan kurang setuju terhadap kondisi tersebut. Mengenai penegakan hukum dalam kaitannya dengan dunia usaha, sebanyak 43% responden menyatakan kurang setuju bahkan 10% responden menyatakan tidak setuju terhadap kondisi tersebut. Indikasi ini menyatakan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa berjalannya proses penegakan hukum yang berkaitan dengan dunia usaha masih belum konsisten untuk ditegakkan sebagaimana mestinya. Tentu hal ini menjadi bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Simalungun, bagaimana peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia usaha harus lebih tegas dan konsisten. Ini juga bertujuan memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pelaku usaha di Kabupaten Simalungun, yang pada akhirnya menciptakan iklim usaha yang baik sehingga kegiatan perekonomian akan berjalan lancar.

Dalam variabel keuangan daerah, 47% responden kurang setuju bahwa jumlah APBD yang ada sekarang telah sesuai dengan kebutuhan dan 23% tidak setuju. Namun, 30% responden menyatakan setuju bahwa jumlah APBD yang ada sekarang telah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk realisasi APBD yang telah sesuai dengan rencana program dan anggaran 57% responden menyatakan tidak setuju dengan hal ini. 13% responden kurang setuju, 3% responden menyatakan tidak setuju, dan 27% responden menyatakan setuju. Saat ini APBD Simalungun berjumlah Rp 2,1 triliun, namun 70% dari jumlah tersebut digunakan untuk belanja pegawai. Jumlah tersebut masih jauh diatas jumlah ideal yaitu sekitar 30% untuk keperluan belanja pegawai. Dengan tingginya angka tersebut tentu saja mengurangi anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Simalungun.

Kondisi diatas tentu menggambarkan bahwa variabel pembiayaan pembangunan atau keuangan daerah yang lebih perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar lebih diperbaiki untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Simalungun.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Faktor Infrastruktur fisik menjadi prioritas utama dalam faktor penentu daya saing Ekonomi Kabupaten Simalungun ditahun 2015 dengan nilai bobot tertinggi sebesar 0,392. Kemudian, faktor perekonomian daerah (0,221), faktor tenaga kerja dan produktifitas (0,199). Kemudian, diikuti oleh faktor sosial politik (0,098) dan faktor kelembagaan (0,090)
2. Untuk faktor infrastruktur yang paling penting adalah variabel kualitas infrastruktur sebesar 55% dari keseluruhan bobot faktor infrastruktur fisik. Dimana kualitas infrastuktur yang perlu diperhatikan adalah kualitas jalan dan pelabuhan udara yang belum difungsikan di Kabupaten Simalungun.

3. Untuk faktor perekonomian daerah skala prioritas utama adalah potensi ekonomi dengan melihat tingkat daya beli masyarakat, perkembangan kondisi ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga kestabilan harga.
4. Faktor tenaga kerja dan produktifitas, skala prioritas yang utama adalah produktifitas tenaga kerja dan kesesuaian tingkat upah.
5. Untuk faktor sosial politik, skala prioritasnya adalah stabilitas politik berdasarkan menurunnya potensi konflik dan unjuk rasa di masyarakat serta hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran untuk dapat dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur, dan pemerataan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian dan mendorong munculnya berbagai kegiatan usaha baru, dan sebagai upaya untuk memudahkan mobilitas kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi di Kabupaten Simalungun
2. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja dengan produktifitas tinggi serta terampil. Sehingga mampu bersaing dalam hal mencari penghidupan yang layak, sebagai upaya untuk menekan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Simalungun.
3. Perlunya peningkatan porsi belanja modal dan belanja barang dalam APBD Kabupaten Simalungun agar mampu melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, Armida, S., Effendi, N., Boediono, 2002. *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2014. *Simalungun dalam Angka 2014*, BPS Kabupaten Simalungun, Simalungun.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2013. *Profil Kependudukan Kabupaten Simalungun tahun 2013*, BPS Kabupaten Simalungun, Simalungun.
- Darwanto, Herry, 2011. *Analisis Peringkat Daya Saing Indonesia 2008-2011*, Bappenas, Jakarta
- Gatra News, 2013. *Kota-kota Yang terancam Bangkrut*, <http://www.gatra.com/fokus-berita/35914-kota-kota-yang-terancam-bangkrut.html> (28 Maret 2015)
- Frinces, Helfin Z, 2011. *Persaingan dan Daya Saing : Kajian Strategis Globalisasi Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halwani, R., Hendra, 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hidayat, Paidi, 2012. “Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan”, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Volume 4 Nomor 3, hal 228-238.
- Irawati, Ira., Zulfadly Urufi, Renato Everardo Isaias Rezza Resobeoen, Agus Setiawan, Aryanto, 2008. “Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Prosiding INSAHP5*, Semarang.
- Indrawati, Dede, 2012. “*Analisis Elemen-Elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru (Studi di Kabupaten Bandung Barat)*”. Skripsi. Depok.
- Kemenkeu RI, Dirjen Perimbangan Keuangan, 2012. *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara*, <http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/257/02.%20SUMATERA%20UTARA.pdf> (07 Feb. 2015)
- KPPOD, 2005. “*Daya Tarik Investasi 214 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2004*”, KPPOD, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggi Rahajeng, 2005. “Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10 No.2, hal 171-184.
- Millah, Anita Nur, 2013 “*Analisis Daya Saing Daerah di Jawa*”, Skripsi, Semarang.
- Mubyarto, 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- PPSK-BI dan LP3E FE UNPAD, 2008. *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Porter, Michael E, 1990. *The Competitive Advantage of Nation*, The Free Press.
- Republika Online, 2014. *Indeks Daya Saing Global Indonesia Naik Empat Peringkat*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/17/nc1e-rr-indeks-daya-saing-global-indonesia-naik-empat-peringkat> (08 Feb. 2015)
- Saaty, Thomas L, 1990. *Decision Making For Leader :The Analytic Hierarchy Process For Decision in A Complex World*, University of Pittsburgh, Pittsburgh.
- Santoso, Eko Budi, 2009. “Daya Saing Kota-kota Besar di Indonesia”, *Makalah*, Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS, Surabaya.

- Sugiyono, Fx, 2004. "Peningkatan Daya Saing Ekonomi Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, hal 14-27.
- Taniredja, Tukiran., Hidayati Mustafidah, 2011. *Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung
- Undang Undang Otonomi Daerah Terbaru, 2005. Pustaka Pelajar, Jakarta
- Wikipedia, 2014. *Kabupaten Simalungun*, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun (08 Feb. 2015)